

Perlu Rp8 Triliun Hadirkan Kereta Api, Dianggap Belum Layak Secara Finansial, Dishub Paparkan Hasil Studi Kelayakan



Sumber gambar: kaltimpost.co.id

Rabu, 11/12/2024

SAMARINDA - Mimpi warga Samarinda untuk memiliki kereta api semakin jauh. Pasalnya hasil studi kelayakan (*feasibility study*/FS) menyebut Samarinda belum layak secara finansial menghadirkan moda transportasi tersebut. Namun demikian, adanya dokumen FS ini menjadi bukti Samarinda sudah siap jika sewaktu-waktu pemerintah pusat atau provinsi memberikan dukungan anggaran.

Walikota Samarinda Andi Harun mengakui bahwa pembangunan jalur kereta api ini membutuhkan investasi yang sangat besar, yakni sekitar Rp8 triliun. Angka ini dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang diperkirakan akan menggunakan kereta api tersebut. "Saat ini, jumlah penumpang yang diperkirakan menggunakan kereta api dari Samarinda ke APT Pranoto masih relatif sedikit. Namun, kami optimistis bahwa ke depan jumlah penumpang akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas di sekitar bandara," ujarnya.

Andi Harun berharap dokumen ini dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah proyek kereta api ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. "FS ini sangat penting karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan provinsi dalam memberikan dukungan finansial," jelasnya.

Andi Harun berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat mendukung penuh rencana pembangunan jalur kereta api ini. Menurutnya, proyek ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas di Samarinda, tetapi juga akan menjadi solusi untuk

mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara. "Karena perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mewujudkan proyek ini. Kami yakin, dengan dukungan semua pihak, maka dapat membangun transportasi massal yang modern dan efisien di Samarinda," tegasnya.

Meskipun proyek kereta api ini masih menghadapi sejumlah tantangan, namun Andi Harun tetap optimistis bahwa proyek ini akan terwujud di masa depan. Meskipun saat ini belum layak secara finansial, namun di masa depan, ketika aktivitas ekonomi di sekitar bandara semakin meningkat, proyek ini akan menjadi sangat menguntungkan. "Harus melihat proyek ini sebagai investasi jangka panjang," pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id , Perlu Rp8 Triliun Hadirkan Kereta Api, Dianggap Belum Layak Secara Finansial, Dishub Paparkan Hasil Studi Kelayakan, 11/12/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (PP 33/2021), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 1. Perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
 5. Prasarana perkeretaapian Adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
2. Dalam Pasal 11 PP 33/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Permohonan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum diajukan oleh badan usaha kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi:
 - a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;
 - b. gambar teknis;
 - c. data lapangan;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. metode pelaksanaan;

- g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan;
- h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL; dan
- i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.